

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN UNTUK MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* KABUPATEN ENREKANG

**ZAINUDDIN SAMAD ¹⁾, AHMAD MUSTANIR ²⁾,
MUH. YUSUF PUTRA PRATAMA ³⁾**

Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Indonesia ^{1) 2) 3)}

E-mail: atto_msi@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan, mengetahui good governance, serta untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan dalam mewujudkan good governance di Desa Karueng Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang dengan hipotesis yaitu partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan berpengaruh signifikan terhadap good governance. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh dengan jumlah sampel sebanyak 35 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, kuesioner (angket), dan dokumentasi. Teknik analisis data kuantitatif yang digunakan yaitu analisis tabulasi frekuensi dan analisis regresi sederhana dengan bantuan program SPSS 22.0 for windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) rata-rata persentase partisipasi masyarakat sebesar 58% termasuk kategori cukup, 2) rata-rata persentase good governance sebesar 69,4% termasuk kategori baik, 3) partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan untuk mewujudkan good governance di Desa Karueng Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang berjalan baik, dimana nilai t hitung = 3,921 > t tabel = 2,004 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 dengan persentase sebesar 57% maka dapat dikatakan bahwa hipotesis positif (H_1) diterima dan hipotesis negatif (H_0) ditolak.

Kata Kunci : *Good Governance, Musyawarah Rencana Pembangunan, Partisipasi Masyarakat*

PENDAHULUAN

Pembangunan harus kelompok-kelompok sosial yang ada mencerminkan perubahan total suatu didalamnya. Selain itu pembangunan masyarakat atau penyesuaian sistem bertujuan untuk mewujudkan sosial secara keseluruhan, tanpa masyarakat adil, makmur, dan mengabaikan keragaman kebutuhan sejahtera. Dalam penyelenggaraan

pembangunan tahapan yang paling awal dan merupakan tahapan yang paling vital adalah tahapan perencanaan. Perencanaan merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh suatu negara.

Dalam perencanaan pembangunan pemerintah perlu melibatkan segenap kemampuan dan kemauan yang dimiliki oleh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan (partisipatif). Oleh karena itu pemerintah dalam menjalankan proses-proses pemerintahan dalam membangun masyarakat harus menekankan perlunya partisipasi masyarakat dengan beragam kepentingan ataupun latar belakang yang berbeda.

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut maka banyak aspek yang harus diperhatikan, diantaranya adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.

Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah satu dari komponen tata pemerintahan (pemerintah, masyarakat, swasta) tidak berperan atau berfungsi. Karena itu musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) desa merupakan forum dialogis antara pemerintah desa dengan pemangku kepentingan lainnya untuk mendiskusikan dan menyepakati program pembangunan yang dapat memajukan keadaan desa. Pembangunan yang baik akan terselenggara apabila diawali dengan

perencanaan yang baik pula, sehingga mampu dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di desa. Untuk itu, maka proses perencanaan memerlukan keterlibatan masyarakat, diantaranya dengan melakukan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

Tanpa melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan maka pembangunan tidak akan bisa dan tidak menemui sasaran yang dicapai karena kebijakan yang dikeluarkan pemimpin sangat jauh dari aspirasi, kepentingan, dan kebutuhan rakyat. Selain itu, hilangnya partisipasi mengakibatkan mudarnya kontrol rakyat dan akibatnya banyak terjadi pengingkaran amanat rakyat yang berakhir pada proses penyalahgunaan kekuasaan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan bukan hanya dilihat sebagai proses tetapi juga merupakan hasil akhir, yang mana partisipasi masyarakat adalah salah satu indikator yang mempengaruhi hasil pembangunan desa. Partisipasi masyarakat bukan lagi merupakan kewajiban, melainkan sudah merupakan hak bagi masyarakat untuk terjun langsung berpartisipasi/ ikut serta dalam setiap perencanaan atau kegiatan pembangunan, karena masyarakat mengetahui potensi dan kendala apa yang dihadapi, mereka yang memiliki kebebasan untuk memutuskan pelaksanaan suatu kegiatan pembangunan. Dalam sistem pemerintahan aktualisasi partisipasi

masyarakat sangat penting untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Perwujudan *good governance* adalah merupakan kebutuhan mutlak masyarakat demi meningkatkan suatu kinerja pemerintahan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat dengan aturan-aturan yang berlaku secara universal. Hal ini dapat juga menjadi faktor terwujudnya *good governance* yang menghendaki bahwa berbagai proses pemerintahan baik itu dari segi proses perumusan tingkatan kinerja kerja, perumusan arus investasi, dan komunikasi pemerintah terhadap sumber daya manusia yang ada dalam ruang lingkup pemerintahan agar berjalan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perwujudan *good governance* mensyaratkan adanya transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Partisipasi masyarakat pemerintahan merupakan suatu hal yang sangat penting dan menjadi semakin penting sejalan dengan semakin kuatnya keinginan untuk mengembangkan praktek *good governance*.

Berdasarkan hasil observasi di Desa Karueng Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang pada tanggal 09 April 2018, peneliti menemukan masalah yaitu kurang aktifnya masyarakat dalam proses musrenbang sehingga daftar prioritas rencana pembangunan desa yang seharusnya diusulkan dan diajukan langsung oleh

masyarakat cenderung diambil alih tugasnya oleh para elit Desa Karueng, kurangnya tanggung jawab dan keikutsertaan masyarakat di dalam kegiatan yang melibatkan masyarakat. Hal ini terlihat dari seringnya masyarakat datang terlambat dalam suatu kegiatan dan juga terlihat dari tingkat absensi masyarakat, masyarakat yang terlibat dan ikut serta dalam musrenbang hanya 20 orang. Sehingga demikian dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat yang sesungguhnya masih jauh dari harapan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka riset ini akan menjawab permasalahan partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan, implementasi *good governance*, dan pengaruh partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan untuk mewujudkan *good governance* di Desa Karueng Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang.

KAJIAN PUSTAKA

1. Partisipasi Masyarakat

(TotokMardikanto, 2013;(A. D. Mustanir 2016)(A. Mustanir and Lubis 2017); (A. Mustanir and Abadi 2017)mengatakan bahwapartisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upayamengatasi masalah, dan keikutsertaan masyarakat

dalam proses menilai hasil akhir terhadap perubahan yang terjadi.

Adisasmita (dalam Solekhan, 2014: 141) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan, meliputi kegiatan perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat. Partisipasi masyarakat mempunyai karakteristik yang proaktif dan reaktif (dalam artian masyarakat berpikirkemudian baru bertindak), ada persetujuan yang disepakati oleh semua masyarakat yang terlibat, ada perbuatan yang mengisi suatu kesepakatan, ada pembagian tugas dan tanggung jawab dalam kedudukan yang adil (Kholifah R and Mustanir 2019).

Solekhan (2014: 153) (A. Mustanir, Abadi, and Nasri 2016) mengatakan bahwa bentuk-bentuk partisipasi masyarakat pada intinya ada (empat) macam, yaitu:

- a. Partisipasi dalam pembuatan keputusan
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan
- c. Partisipasi dalam menerima manfaat
- d. Partisipasi dalam evaluasi

Tidak ada jaminan bahwa suatu kegiatan akan tetap berlanjut melalui keikutsertaan masyarakat semata. Kesuksesannya tergantung pada jenis apa partisipasi masyarakat dalam proses keterlibatannya. Artinya, sejauh mana masyarakat dapat paham terhadap suatu kegiatan sehingga ia turut serta di dalamnya.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tipe partisipasi masyarakat dapat kita sebut sebagai tingkatan/ jenjang keikutsertaan yang dilakukan oleh masyarakat dalam suatu kegiatan maka seharusnya masyarakat dapat paham dalam kegiatan mana mereka harus ikut serta.

Terdapat faktor yang dapat memengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu pelaksanaan kegiatan, faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan suatu kegiatan tetapi ada juga yang dapat menghambat kesuksesan suatu kegiatan. Misalnya saja faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan.

2. Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang)

Salah satu sarana yang disediakan oleh pemerintah kepada setiap masyarakat untuk berperan dalam perencanaan pembangunan daerah adalah melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) berdasarkan Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang melembagakan Musrembang di semua peringkat pemerintahan untuk membuat perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

Sulaiman dalam Huraerah (2008: 103) (Ahmad Mustanir et al. 2018) (Uceng, Erfina, et al. 2019) (A. Mustanir et al. 2018) (A. Mustanir and Razak 2017) (Sapri et al.

2019) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan adalah:

a. Bentuk partisipasi

Pada tahapan ini bentuk partisipasi masyarakat yang bisa disumbangkan dalam perencanaan pembangunan berbentuk tingkat kehadiran, memberikan ide atau gagasan dalam penentuan usulan prioritas. Ide atau gagasan disampaikan melalui musyawarah perencanaan pembangunan, dan hasil ide-ide tersebut akan diusulkan dalam penetapan usulan. Bentuk partisipasi masyarakat diberikan dalam bentuk sumbangan pikiran, saran, usulan maupun kritik dalam pertemuan atau rapat yang diadakan untuk membicarakan kegiatan yang akan dilaksanakan.

b. Kewenangan pengambilan keputusan

Peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan sangat penting, diskusi intensif antara pihak berkepentingan (*stakeholders*), baik dari unsur pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha terkait perlu diselenggarakan untuk dapat saling melengkapi informasi dan menyamakan persepsi tentang kebijakan yang akan diputuskan oleh aparat tersebut. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan hendaknya masyarakat tidak dipandang sebagai obyek semata, tetapi harus dilibatkan sebagai pelaku aktif dalam pembangunan mulai sejak perencanaan,

pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.

c. Metode/cara pemberian usulan

Salah satu ciri perencanaan partisipatif adalah terfokus pada kepentingan masyarakat, dan juga berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat. Untuk menjawab kebutuhan dan permasalahan tersebut maka dilakukan identifikasi dan penetapan permasalahan, menggali dan mengumpulkan masalah-masalah dan kebutuhan masyarakat (Uceng, Ali, et al. 2019) (A. Mustanir et al. 2018) (A. Mustanir, Madaling, et al. 2019) (A. Mustanir, Ramadhan, et al. 2019)

3. Good Governance

Dalam pandangan konsep pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*), Sinambela (2006:48) (Sellang, Kamaruddin; Ahmad, Jamaluddin; Mustanir 2019) memberikan beberapa prinsip-prinsip dasar yang harus dianut dalam mewujudkan *good governance*, yaitu sebagai berikut:

1. Akuntabilitas, yaitu kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakan pimpinan suatu organisasi kepada publik yang memiliki hak pertanggungjawaban.
2. Transparansi, dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan mengenai kebijakan Pemerintah dan organisasi badan hukum.
3. Keterbukaan, pemberian informasi secara terbuka terhadap saran dan kritik yang dianggap sebagai

- partisipasi masyarakat untuk perbaikan.
4. Berdasarkan hukum (supremasi hukum) yaitu keputusan dan kebijakan pemerintah serta organisasi yang menyangkut kepentingan masyarakat dilakukan berdasarkan hukum.
 5. Jaminan, *fairness, a level playing field* (perlakuan yang adil/perlakuan kesetaraan).

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian kuantitatif. Jenis penelitian deskriptif kuantitatif (Ahmad, J, 2015; Sugiyono, 2016). Populasi dan sampel dalam penelitian ini terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh pendidik, tokoh agama dan tokoh pemuda yang mengikuti musyawarah rencana pembangunan berjumlah 35 orang.

Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul dilakukan analisis regresi sederhana dengan bantuan program SPSS 22.0 *for windows*. Hasil analisis berupa analisis tabulasi frekuensi dan menggunakan *skala likert* sebagai alat ukur, analisis regresi sederhana dan uji kualitas data.

Analisis regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional atau kausal. Menurut Sugiyono (2016: 204) rumus regresi sederhana yaitu: $Y = a + bX$. Prosesi (ketepatan) fungsi regresi sederhana dalam menaksirkan nilai aktual dapat diukur dari nilai *goodness of fit*-nya. Secara statistik,

setidaknya ini dapat diukur dari nilai statistik f, nilai statistik t, dan nilai koefisien determinasi. Uji statistik f digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Nilai statistik F disebut signifikan apabila $f\text{-hitung} < 0.05$, atau apabila nilai $f\text{-hitung} > f\text{-tabel}$.

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/ *independen* secara individual menerangkan variasi variabel *dependen*. Perhitungan nilai statistik t disebut signifikan apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak), dan disebut tidak signifikan apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah di mana H_0 diterima. Atau dengan membandingkan tingkat signifikansi t dengan 0.05 ($\alpha = 5\%$) atau membandingkan antara f hitung dengan f-tabel. Apabila tingkat signifikansi f-hitung < 0.05 atau apabila nilai f-hitung $> f\text{-tabel}$ maka hipotesis diterima.

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel *dependen*. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu.

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu item dalam kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Model pengujian menggunakan pendekatan korelasi item-total dikoreksi (*corrected item-total correlation*) untuk menguji validitas internal setiap item pertanyaan kuesioner yang disusun dalam bentuk skala. Untuk menentukan apakah sebuah item dinyatakan valid atau tidak, maka para ahli menetapkan patokan besaran koefisien korelasi item total dikoreksi sebesar 0,25 atau 0,30 sebagai batas minimal valid tidaknya sebuah item. Artinya, sama atau lebih besar dari 0,25 atau 0,30 mengindikasikan item tersebut memiliki validitas yang memadai.

Uji reliabilitas adalah alat yang digunakan untuk mengukur konsistensi suatu kuesioner yang merupakan

indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan *reliabel* atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu konstruk atau variabel dikatakan *reliabel* jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $\geq 0,60$.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan di Desa Karueng Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, maka untuk mengetahui tingkatan partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan dapat dilihat pada tabel rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 1

Rekapitulasi Tanggapan Respondent tentang Partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan

No	Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan	Persentase (%)
1.	Partisipasi dalam identifikasi masalah	53,8
2.	Partisipasi dalam pengambilan keputusan	57,2
3.	Partisipasi dalam pelaksanaan	54,2
4.	Partisipasi dalam evaluasi	66,8
Jumlah		232
Skor rata-rata = $\frac{232}{4} = 58\%$		

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner November 2018.

Tabel 1 menjelaskan tanggapan responden tentang partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan di Desa Karueng Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Dari keempat indikator antara lain partisipasi dalam identifikasi masalah, partisipasi dalam

pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan dan partisipasi dalam evaluasi diperoleh rata-rata persentase sebesar 58% yang termasuk kategori cukup.

Untuk memperkuat penilaian responden seperti yang diuraikan di atas, penulis melakukan penelusuran

data melalui wawancara pada tanggal 24 Oktober 2018 dengan Kepala Desa Karueng (Usmayadi Syarifuddin), beliau mengatakan bahwa:

“Partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan di Desa Karueng masih kurang dan untuk rencana ke depan kami akan lebih giat lagi meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melibatkan seluruh masyarakat dalam proses kegiatan musyawarah rencana pembangunan agar proses pembangunan desa lebih maksimal sehingga masyarakat dapat merasakan kemudahan akses”.

Berdasarkan hasil rekapitulasi dan wawancara dengan Kepala Desa

Karueng, maka penulis menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan di Desa Karueng Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang merupakan keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat serta keikutsertaan masyarakat dalam proses menilai hasil akhir terhadap perubahan yang terjadi dalam pembangunan desa.

Berdasarkan hasil penelitian tentang *good governance* di Desa Karueng Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, maka untuk mengetahui tingkatan *good governance* dapat dilihat pada tabel rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 2

Rekapitulasi Tanggapan Responden tentang *Good Governancedi* Desa Karueng Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang

No.	<i>Good Governance</i>	Persentase (%)
1.	Akuntabilitas	63,4
2.	Transparansi	70,2
3.	Keterbukaan	72,6
4.	Supremasi hukum	69,2
5.	Jaminan	71,4
Jumlah		346,8
Skor rata-rata= $\frac{346,8}{5} = 69,4 \%$		

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner November 2018.

Tabel 2 menjelaskan tanggapan responden tentang *good governance* di Desa Karueng Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Dari kelima indikator antara lain akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, supremasi hukum dan jaminan diperoleh rata-rata persentase sebesar 69,4% yang termasuk kategori baik.

Untuk memperkuat penilaian responden seperti yang diuraikan di atas, penulis melakukan penelusuran data melalui wawancara pada tanggal 05 Oktober 2018 dengan Sekretaris Desa Karueng (Hasrianto), beliau mengatakan bahwa:

“Good governance yang diharapkan di desa ini sudah

berjalan namun belum terealisasi secara maksimal, karena prinsip akuntabilitas atau pertanggungjawaban di desa ini belum baik sehingga menghambat tercapainya tujuan yang diinginkan”.

Berdasarkan hasil rekapan rekapitulasi dan wawancara dengan Sekretaris Desa Karueng, maka penulis

menyimpulkan bahwa *good governance* di Desa Karueng Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang adalah sudah baik walaupun pelaksanaannya kurang maksimal karena disebabkan oleh prinsip akuntabilitas atau pertanggungjawaban belum baik sehingga menghambat tercapainya tujuan yang diinginkan.

Tabel 3.

Variables Entered/Removed
 Analisis Regresi Sederhana Pengaruh X terhadap Y melalui Olahan SPSS

Variables Entered/Removed ^b			
Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Partisipasi_Masyarakat ^a		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: GoodGovernance

Tabel di atas menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan atau dibuang dan metode yang digunakan. Dalam hal ini variabel yang dimasukkan adalah

variabel nilai partisipasi masyarakat sebagai predictor dan metode yang digunakan adalah metode *enter*.

Tabel 4.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.755 ^a	.570	.557	1.532

a. Predictors: (Constant), Partisipasi_Masyarakat

Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi/ hubungan (R) yaitu sebesar 0,755 dan dijelaskan pula besarnya presentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil dari penguadratan R. Dari hasil perhitungan di atas,

diperoleh koefisien determinasi (R²) sebesar 0,570 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel partisipasi masyarakat terhadap variabel *good governance* adalah sebesar 57% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain.

Tabel 5.
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	102.759	1	102.759	43.805	.000 ^a
	Residual	77.412	33	2.346		
	Total	180.171	34			

a. Predictors: (Constant), Partisipasi_Masyarakat

b. Dependent Variable: Good_Governance

Tabel di atas menjelaskan apakah terdapat pengaruh yang nyata (signifikan) variabel partisipasi masyarakat (X) terhadap variabel *good governance* (Y). Dari hasil perhitungan di atas terlihat bahwa $F_{hitung} = 43.805 > F_{tabel} = 4,12$ dengan tingkat signifikan probabilitas $0,000 < 0,005$, maka model regresi dapat dipakai memprediksi variabel *good governance*.

Tabel 6.
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	9.591	1.204		7.967	.000
Partisipasi_Masyarakat	.671	.101	.755	6.619	.000

a. Dependent Variable: GoodGovernance

Tabel di atas menjelaskan padakolom B pada *constant* (a) adalah 9,591 sedangkan nilai partisipasi masyarakat adalah 0,671, sehingga persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = a + bX \text{ atau } 9,591 + 0,671X$$

Koefisien b dinamakan koefisien arah regresi dan menyatakan perubahan rata-rata variabel Y untuk setiap perubahan variabel X sebesar satu satuan. Perubahan ini merupakan pertambahan bila b bertanda positif dan penurunan bila b bertanda negatif.

Sehingga dari persamaan tersebut dapat dijelaskan:

a) Konstanta sebesar 9,591 menyatakan bahwa jika tidak ada nilai partisipasi masyarakat maka nilai *good governance* sebesar 9,591.

b) Koefisien regresi X sebesar 0,671 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 nilai partisipasi masyarakat, maka nilai *good governance* bertambah sebesar 0,671.

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui nilai t hitung = $6,619 >$

t tabel= 3,340 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Maka Ho ditolak dan H1 diterima, yang berarti ada pengaruh yang nyata (signifikan) variabel partisipasi masyarakat (X) terhadap variabel *good governance* (Y).

2. Uji Kualitas Data

a) Uji validitas

Uji validitas penelitian ini menggunakan pendekatan korelasi item-total dikoreksi (*corrected item-total correlation*) untuk menguji

validasi internal setiap item pertanyaan kuesioner. Untuk menentukan apakah sebuah item dinyatakan valid atau tidak maka para ahli menetapkan patokan besaran koefisien korelasi item total dikoreksi sebesar 0,25 atau 0,30 sebagai batas minimal valid tidaknya sebuah item yang dapat dilihat dari hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS versi 22.0 *for windows*

Tabel 7.

Hasil Uji Validitas Variabel X (Partisipasi Masyarakat)

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if	Item Deleted	Item Deleted	Total Correlation	Item Deleted
X1	8.91	3.492	.676	.574	
X2	8.74	4.079	.564	.650	
X3	8.89	4.398	.377	.761	
X4	8.26	4.491	.507	.685	

Sumber: Olahan Data SPSS November 2018.

Berdasarkan tabel hasil olahan uji validitas di atas, diketahui bahwa variabel partisipasi masyarakat(X) dinyatakan valid dengan nilai *corrected item-total correlation* lebih besar dari > 0,25-0,30 (X1= 0,676; X2= 0,564; X3= 0,377; X4= 0,507 > 0,25-0,30).

Tabel 8.

Hasil Uji Validitas Variabel Y (*Good Governance*)

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if	Item Deleted	Item Deleted	Correlation	Item Deleted
Y1	14.20	3.341	.391	.509	
Y2	13.86	3.538	.355	.530	
Y3	13.74	4.197	.429	.520	
Y4	13.89	3.339	.304	.576	
Y5	13.80	4.282	.368	.540	

Sumber: Olahan Data SPSS November 2018

Berdasarkan tabel hasil olahan uji validitas di atas, diketahui bahwa 5 item (indikator *good governance*) yang digunakan untuk mengukur variabel *good governance* (Y) dinyatakan valid dengan nilai *corrected item-total correlation* lebih besar dari $> 0,25-0,30$ (Y1= 0,391; Y2= 0,355; Y3=0,429; Y4=0,304; Y5=0,368 $> 0,25-0,30$).

b). Uji Reliabilitas

Guna menjaga kehandalan dari sebuah instrumen atau alat ukur maka peneliti

melakukan uji reliabilitas, dimana instrumen yang dilakukan uji reliabilitas adalah instrument yang dinyatakan valid, sedangkan instrumen yang dinyatakan tidak valid maka tidak bisa dilakukan uji reliabilitas. Pengukuran reliabilitas ini menggunakan rumus *Alpha Cronbach* dengan bantuan SPSS 22.0 *for windows*. Suatu konstruk atau variabel dinyatakan reliabel jika memberika nilai Cronbach Alpha $> 0,60$

Tabel 9

Hasil Uji Reliabilitas Variabel X (Partisipasi Masyarakat)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.733	4

Sumber: Olahan Data SPSS November 2018.

Berdasarkan tabel *reliability statistics* di atas, kuesioner penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel partisipasi masyarakat (X) dikatakan

reliabel atau handal karena *Cronbach Alpha* yang diperoleh adalah sebesar 0,733 yang berarti lebih besar dari 0,60 ($0,733 > 0,60$)

Tabel 10

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y (*Good Governance*)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.690	5

Sumber: Olahan Data SPSS November 2018

Berdasarkan tabel *reliability statistics* di atas, kuesioner penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel *good governance* (Y)

dikatakan reliabel atau handal karena *Cronbach Alpha* yang diperoleh adalah sebesar 0,690 yang berarti lebih besar dari 0,60 ($0,690 > 0,60$).

Analisis regresi sederhana data menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang nyata (signifikan) antara partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan untuk mewujudkan *good governance* di Desa Karueng Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan uji hipotesis yang telah dilakukan menggunakan analisis regresi sederhana dengan olahan SPSS versi 22.0 *for windows* yang menunjukkan nilai korelasi/ hubungan (R) yaitu sebesar 0,755.

Perhitungan tingkatan hubungan antara variabel partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan untuk mewujudkan *good governance* juga kuat, hal dilihat dari nilai *constant* (a) sebesar 9,591 sedangkan nilai partisipasi masyarakat adalah 0,671 dengan persamaan $Y = a + bX$ atau $9,591 + 0,671X$. Koefisien b dinamakan koefisien arah regresi dan menyatakan perubahan rata-rata variabel Y untuk setiap perubahan variabel X sebesar satu satuan. Perubahan ini merupakan pertambahan bila b bertanda positif dan penurunan bila b bertanda negatif.

Dari hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan berkontribusi terhadap *good governance*. Besarnya kontribusi variabel X (partisipasi masyarakat) terhadap variabel Y (*good governance*) sebesar 57%. Hal tersebut menunjukkan, bahwa selain partisipasi masyarakat,

ada faktor lain yang mempengaruhi *good governance*

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan di Desa Karueng Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, meliputi: partisipasi dalam identifikasi masalah, partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan dan partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan sebesar 58% termasuk kategori cukup.
2. *Good governance* di Desa Karueng Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, meliputi: akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, supremasi hukum dan jaminan. *Good governance* sebesar 69,4% yang termasuk kategori baik.

Berdasarkan hasil olahan analisis regresi sederhana menggunakan SPSS 22.0 *for windows*, diketahui nilai t hitung = 6,619 > t tabel = 3,340 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dengan persentase sebesar 57% maka dapat dikatakan bahwa hipotesis positif (H_1) diterima dan hipotesis negatif (H_0) ditolak. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel partisipasi masyarakat (X) terhadap variabel *good governance* (Y). Semakin baik partisipasi masyarakat maka akan

semakin meningkat *good governance* di
Desa Karueng Kecamatan Enrekang
Kabupaten Enrekang

https://www.researchgate.net/publication/330090538_Democratic_Model_On_Decision-Making_At_Deliberations_Of_Development_Planning.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, J. (2015). *Metode Penelitian Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media.
- Huraerah, Abu. (2008). *Pengorganisasian & Pengembangan Masyarakat Model & Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora.
- Isbandi. W. (2007). *Partisipasi Masyarakat*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Mardikanto, Totok. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Ahmad Mustanir, Nur Justira, Kamaruddin Sellang, and Andi Ilham Muchtar. 2018. "Democratic Model On Decision-Making At Deliberations Of Development Planning." In *International Conference on Government Leadership and Social Science (ICOGLOSS). Demanding Governance Accountability and Promoting Democratic Leadership for Public Welfare Achievement*, 110 – 115.
- Kholifah R, Emy, and Ahmad Mustanir. 2019. "Food Policy and Its Impact on Local Food." In *Proceeding ICOGISS 2019*, 27–38. Jember: Universitas Muhammadiyah Jember. <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/ICOGISS19/article/view/2465>.
- Mustanir, Ahmad; Darmiah. 2016. "Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpo Kabupaten Sidenreng Rappang." *Jurnal Politik Profetik* 04 (2): 225–38. <Http://Journal.Uin-Alauddin.Ac.Id/Index.Php/Jpp/Article/View/2749>.
- Mustanir, Ahmad, And Partisan Abadi. 2017. "Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang." *Jurnal Politik Profetik* 5 (2): 247–61. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/viewFile/4347/3986>.

- Mustanir, Ahmad, Partisan Abadi, and A Nasri. 2016. "Participation of Ethnic Community Towani Tolotang in Deliberation of Development Plan." In *International Conference on Ethics in Governance (ICONEG 2016)*, 84:356 – 359. Makassar: Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/iconeg-16.2017.79>.
- Mustanir, Ahmad, and Sandi Lubis. 2017. "Participatory Rural Appraisal in Deliberations of Development Planning." *International Conference On Democracy, Accountability, and Governance (ICODAG 2017)*. Vol. 163. <https://doi.org/10.2991/icodag-17.2017.60>.
- Mustanir, Ahmad, Madaling Madaling, Andi Uceng, M.Nurzin R Kasau, Barisan Barisan, and Dewi Andriani. 2019. "Karakteristik Kepemimpinan Lurah Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang." *Jurnal Ilmiah Clean Government (JCG) 2 (2)*: 145–72.
- Mustanir, Ahmad, Muhammad Rohady Ramadhan, M Rais Rahmat Razak, Lukman Lukman, Sapri Sapri, and Takhrim Takhrim. 2019. "Peranan Camat Dan Komunikasi Pemerintahan Terhadap Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang." *Jurnal Ilmiah Clean Government (JCG) 2 (2)*: 94–114.
- Mustanir, Ahmad, and M Rais Rahmat Razak. 2017. "Nilai Sosial Budaya Pada Partisipasi Masyarakat Etnik Towani Tolotang Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan." In *Prosiding Konferensi Nasional Ke-6 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (APPPTMA)*, 1–7. Pare Pare: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. <http://asosiasipascaptm.or.id/index.php/publikasi/prosiding-konferensi-nasional-appptma-ke-6>.
- Mustanir, Ahmad, Kamaruddin Sellang, Akhwan Ali, Madaling Madaling, and Mutmainna Mutmainna. 2018. "Peranan Aparatur Pemerintah Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Tonrongnge Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang." *Jurnal Ilmiah Clean Government (JCG) 2 (1)*: 67–84. <http://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id>

- [/index.php/clean/article/view/213](#)
- Mustanir, Ahmad, Muhammad Rohady Ramadhan, M Rais Rahmat Razak, Lukman Lukman, Sapri Sapri, and Takhrim Takhrim. 2019. "Peranan Camat Dan Komunikasi Pemerintahan Terhadap Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang." *Jurnal Ilmiah Clean Government (JCG)* 2 (2): 94–114.
- Sapri, Sapri, Ahmad Mustanir, Monalisa Ibrahim, Andi Astinah Adnan, and Wirfandi Wirfandi. 2019. "Peranan Camat Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang." *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 5 (2): 33–48. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/2127>.
- Sellang, Kamaruddin; Ahmad, Jamaluddin; Mustanir, Ahmad. 2019. *Strategi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*. Edited by Qiara Media. 1st ed. Rappang: CV. Penerbit Qiara Media. https://play.google.com/store/books/details/Kamaruddin_Sellang_S_Sos_M_AP_STRATEGI_DALAM_PENIN?id=U06rDwAAQB AJ.
- Uceng, Andi, Akhwan Ali, Ahmad Mustanir, and Nirmawati Nirmawati. 2019. "Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Sumber Daya Manusia Di Desa Cemba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang." *Jurnal MODERAT* 5 (2): 1–17. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/2125>.
- Uceng, Andi, Erfina Erfina, Ahmad Mustanir, and Sukri Sukri. 2019. "Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Betao Riase Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang." *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 5 (2): 18–32. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/2126>.
- Sinambela, L. P. (2006). *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Solekhan, M. (2014). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Masyarakat*. Malang: Setara Press.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang – Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang